

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pada perekonomian Indonesia UMKM memiliki peran yang sangat penting, UMKM memberikan kontribusi 61,07% atau sekitar Rp 8.573,89 triliun rupiah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap kurang lebih 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (djpb.kemenkeu.go.id, 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja UMKM berimplikasi langsung terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

Tabel 1. 1 Indeks Literasi Keuangan & Inklusi Keuangan 2024

Indeks	Hasil Survei
Literasi	65,43%
Inklusi	75,02%
Gap	9,59%

Sumber : Survei Nasional Literasi Keuangan & Inklusi keuangan Tahun 2024 (OJK & BPS)

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SLINK), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 65,43% sementara indeks inklusi keuangan berada pada angka 75,02%. Perbedaan antara kedua indikator tersebut menunjukkan adanya gap sebesar 9,59%. Gap ini mengindikasikan bahwa meskipun akses masyarakat termasuk pelaku UMKM terhadap layanan dan produk keuangan terus meningkat, tingkat pemahaman serta kemampuan dalam menggunakan layanan keuangan secara efektif masih belum sejalan dengan perluasan akses tersebut. Dengan demikian, UMKM

masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi keuangan sebagai bagian dari proses digitalisasi.

Selain itu, akses permodalan formal masih menjadi tantangan utama bagi banyak pelaku UMKM meskipun pemerintah telah berupaya memperluas pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebagai bentuk komitmen, pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp 300 triliun, naik dari realisasi tahun sebelumnya yang telah disalurkan pada tahun 2024 sebanyak Rp246,58 triliun, untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil (ekon.go.id, 2024). Peningkatan ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap kebutuhan pembiayaan UMKM yang besar dan beragam. Namun demikian, kenaikan target belum menjamin keterjangkauan akses modal bagi seluruh pelaku usaha, sebab masih terdapat hambatan seperti keterbatasan agunan, persyaratan administrasi yang kompleks, dokumentasi usaha yang belum memadai, serta keterbatasan jangkauan layanan lembaga keuangan di daerah terpencil (Hasibuan & Marliyah, 2024) .

Perkembangan sistem pembayaran elektronik (*e-payment*) juga berperan penting dalam transformasi digital UMKM yang dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan pencatatan keuangan. Implementasi standar nasional *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) oleh Bank Indonesia telah mempercepat adopsi pembayaran digital di kalangan pelaku usaha. Hingga Semester I 2025, tercatat lebih dari 57 juta pengguna dan 39,3 juta *merchant* QRIS, dengan sebagian besar merupakan pelaku UMKM, menghasilkan 6,05 miliar transaksi senilai sekitar Rp 579 triliun. Digitalisasi ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas dan pembiayaan berbasis rekam jejak digital. Namun, adopsi *e-payment* belum sepenuhnya merata, kendala seperti keterbatasan literasi digital, infrastruktur, dan kekhawatiran terhadap keamanan transaksi masih menjadi penghambat bagi sebagian besar UMKM untuk memanfaatkan *e-payment* secara optimal (bi.go.id, 2025). Dengan demikian, upaya peningkatan kinerja UMKM perlu ditinjau dari berbagai faktor yang

mempengaruhinya, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan pengelolaan keuangan, akses terhadap layanan keuangan, kemudahan memperoleh permodalan, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung transaksi operasional usaha.

Kinerja merupakan gambaran sejauh mana suatu kegiatan atau program berhasil mencapai tujuan serta visi dan misi organisasi. Dalam konteks UMKM, kinerja usaha mencerminkan kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis, meningkatkan produktivitas, serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (Ariwibawa, 2016). Salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja UMKM adalah literasi keuangan. Menurut Ismail (2024), literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang membentuk perilaku pengelolaan keuangan sehingga pelaku UMKM mampu mengambil keputusan yang tepat. Literasi keuangan yang baik akan membantu pemilik UMKM melakukan pencatatan keuangan, mengelola arus kas, menentukan harga jual, serta membuat keputusan investasi yang lebih akurat, sehingga secara langsung dapat meningkatkan kinerja usaha.

Selain itu, inklusi keuangan juga memiliki peran penting dalam mendorong kinerja UMKM. Otoritas Jasa Keuangan (2024) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai hak setiap individu untuk memperoleh layanan keuangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Pelaku UMKM yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal cenderung lebih mudah memperluas modal, meningkatkan kapasitas usaha, dan memperoleh pendapatan yang lebih stabil dibandingkan mereka yang belum terinklusi secara finansial (Nurhayadi *et al.*, 2024). Dengan akses yang lebih baik terhadap produk keuangan, UMKM dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangannya serta mampu memanfaatkan berbagai fasilitas perbankan maupun fintech yang pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja usaha.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja UMKM adalah penggunaan *e-payment* dan akses permodalan. *E-payment* merupakan sistem pembayaran berbasis elektronik yang menyimpan nilai uang secara digital

(Fachruddin & Saputri, 2023). Candra dan Pabulo (2024) menyatakan bahwa penggunaan *e-payment* seperti QRIS dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mempercepat pelayanan, mengurangi risiko kehilangan uang tunai, serta memperluas pasar melalui digitalisasi. Selain itu, rekam jejak transaksi digital mempermudah UMKM dalam mengajukan pembiayaan. Sementara itu, akses permodalan yang mencakup kemudahan memperoleh pinjaman, prosedur yang sederhana, informasi pembiayaan yang jelas, serta persyaratan kredit yang wajar menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan kapasitas produksi dan daya saing UMKM (Anggraeni *et al.*, 2023).

Berdasarkan hasil observasi awal, kendala tersebut juga dirasakan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas terutama di Kecamatan Ajibarang. Data dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas menyatakan jumlah UMKM di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 sebanyak 89.553 unit. Para UMKM ini memiliki potensi yang akan membantu dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Salah satu Kecamatan yang memiliki potensi dalam sektor perdagangan di Kabupaten Banyumas adalah Kecamatan Ajibarang dengan jumlah UMKM sebanyak 5.521 unit. Namun, dengan jumlah yang cukup besar para pelaku UMKM saat ini masih mengalami kesulitan yang dapat menghambat kinerja UMKM. Dalam pengelolaan keuangannya para pelaku UMKM tidak membedakan antara uang usaha dengan uang pribadi serta tidak dilakukan pembukuan atau pencatatan. Sehingga dapat terjadi kerugian atau modal awal yang dikeluarkan tidak kembali. Selain itu, para pelaku UMKM juga masih banyak yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan ke Lembaga keuangan. Hal ini berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang masih memiliki sedikit modal. Kurangnya pengetahuan dan akses informasi ini membuat UMKM sulit dalam memperoleh akses pembiayaan.

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM Kabupaten Banyumas Tahun 2024

No.	Kecamatan	Mikro (<2M)	Kecil (2-15M)	Menengah (15-50M)	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ajibarang	5.521	-	-	5.521
2	Banyumas	1.644	-	-	1.644
3	Baturraden	3.193	-	-	3.193
4	Cilongok	6.149	-	1	6.150
5	Gumelar	2.570	2	-	2.572
6	Jatilawang	3.128	-	-	3.128
7	Kalibagor	2.420	1	-	2.421
8	Karanglewas	5.231	1	-	5.232
9	Kebasen	3.406	-	1	3.407
10	Kedungbanteng	2.636	-	-	2.636
11	Kembaran	3.708	5	3	3.716
12	Kemranjen	4.259	-	-	4.259
13	Lumbir	2.684	1	-	2.685
14	Patikraja	4.488	-	-	4.488
15	Pekuncen	4.066	-	-	4.066
16	Purwojati	791	1	1	793
17	Purwokerto Barat	2.947	4	-	2.951
18	Purwokerto Selatan	1.859	1	1	1.861
19	Purwokerto Timur	2.878	-	-	2.878
20	Purwokerto Utara	2.654	-	-	2.654
21	Rawalo	2.682	-	-	2.682
22	Sokaraja	3.007	1	1	3.009
23	Somagede	3.358	1	2	3.361
24	Sumbang	3.597	2	3	3.602
25	Sumpiuh	3.776		1	3.777
26	Tambak	3.272	1	-	3.273
27	Wangon	3.553		41	3.594
	Total	89.477	21	55	89.553

Sumber : Data UMKM Kementerian Koperasi dan UKM RI

Beberapa penelitian sebelumnya terkait Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan UMKM yaitu (Sarfiah *et al*, 2025) dan (Nurhayadi *et al.*, 2024) menyatakan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Sedangkan Penelitian (Anggriani *et al.*, 2023) menyatakan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Masdiantini (2023) menyatakan bahwa *e-payment* dan akses permodalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Namun, penelitian Candra & Pabulo (2024) menyatakan bahwa *e-payment* tidak memiliki pengaruh secara signifikan

terhadap kinerja UMKM. Serta hasil penelitian Arventyani & Ismunawan (2024) menyatakan bahwa modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, *e-payment*, dan akses permodalan terhadap kinerja UMKM. Dengan adanya penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM terkait pentingnya kinerja usahanya terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yaitu (Nurhayadi *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel yaitu variabel *e-payment* dan akses permodalan. Serta perbedaan waktu dan lokasi penelitian, waktu penelitian ini dilaksanakan tahun 2026 dan lokasi penelitian di Kecamatan Ajibarang.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul penelitian **“Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, *E-payment*, Dan Akses Permodalan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Ajibarang”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Ajibarang ?
2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Ajibarang ?
3. Apakah *E-payment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Ajibarang ?
4. Apakah akses permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Ajibarang ?

5. Apakah literasi keuangan, inklusi keuangan, *E-payment* dan Akses Permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Ajibarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Ajibarang.
2. Untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Ajibarang.
3. Untuk menganalisis pengaruh *E-payment* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Ajibarang.
4. Untuk menganalisis pengaruh akses permodalan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Ajibarang
5. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, *E-payment* dan Akses Permodalan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Ajibarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan berkontribusi pada pertumbuhan pengetahuan ekonomi.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca terkait unsur-unsur yang mungkin dapat meningkatkan atau menurunkan kinerja UMKM.
3. Manfaat bagi UMKM
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM dengan memberikan wawasan terkait pentingnya literasi keuangan, inklusi keuangan, *E-payment* dan Akses Permodalan yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM.

4. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai sumber referensi dan informasi dalam menyajikan gambaran umum mengenai UMKM.

